

20 April 2021. Tabengan .hal.17

Gubernur Minta BPKP Dorong Kinerja Kabupaten/Kota Raih WTP



H. Sugianto Sabran

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng berperan optimal dalam mendorong kinerja Pemkab/kota mengelola keuangan serta administrasi, dalam upaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Kami berharap di bawah pimpinan Pejabat baru Bambang Ari Setiono, diharapkan BPKP Kalteng bisa berperan se-

bagai auditor sekaligus partner Pemprov dalam mengawal penyelenggaraan keuangan negara dan daerah melalui pemantauan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)," ujarnya, di sela-sela pelantikan Kepala Perwakilan BPKP Bambang Ari Setiono, di Aula Jayang Ti ngang, Senin (19/4).

Menurutnya, saat ini Pemprov Kalteng meraih keberhasilan dengan raih an opini WTP enam kali berturut-turut. Untuk itu diharapkan LKPD

2021 jangan sampai ada penurunan, sehingga perlu adanya masukan serta pendampingan dari BPKP dalam mengoptimalkan lini tersebut.

Dirinya juga menyampaik an penyelenggara Pemerintah Daerah di Kalteng agar meningkatkan kinerja dan akuntabilitas untuk mencapai prestasi bersama.

Namun, yang lebih penting, ucapnya, adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memper-

cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Maka seluruh komponen dan pemangku kepentingan, diharapkan memantapkan koordinasi dan sinergitas, yang mana Perwakilan BPKP Kalimantan Tengah menjadi yang terdepan, dalam mewujudkan kondisi tersebut

"Sehingga pada akhirnya, dengan optimalisasi fungsi pengawasan, kita akan mampu melaksanakan seluruh program pembangu-

nan sesuai prinsip-prinsip Good Governance, sebagai salah satu syarat terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin Berkah," tegasnya.

Selain itu dirinya juga mengapresiasi perwakilan BPKP Kalteng yang selama ini telah berperan penting dalam membantu meningkatkan kinerja Pemprov Kalteng maupun pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain dalam penyusunan

APBD, penyusunan laporan keuangan, penataan aset daerah, serta penyajian laporan lainnya, seperti LKPJ dan LPPD.

"Demikian pula upaya preventif dan represif telah dilakukan, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan, sebagai wujud tanggungjawab meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan auditabel", pungkasnya. E/drn